

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	RDP (Lanjutan)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	14 (empat belas)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 15 April 2015
W a k t u	:	Pukul 10.50 s.d 15.15 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN) didampingi : 1. Dodi Reza Alex Nurdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA) 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	:	Membahas Kinerja PT. Pertamina dan PT. PGN (Persero)
Hadir	:	4 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI 1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN. 2. Dirut PT. Pertamina (Persero) beserta jajaran 3. Dirut PT. PGN (Persero) beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. RDP (Lanjutan) Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 10.50 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 43 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP hari ini, Rabu, 15 April 2015 dalam rangka melanjutkan pembahasan kinerja PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGN (Persero).
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pertamina (Persero), dan Dirut PT. PGN (Persero) untuk memaparkan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Deputy Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pertamina (Persero), dan Dirut PT. PGN (Persero).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melakukan sinergi pada pelaksanaan kegiatan usahanya dalam pengelolaan gas bumi untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk mendukung dan berperan aktif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, antara lain dalam alokasi pasokan gas, regulasi dan perijinan serta pemanfaatan lahan, dalam rangka mewujudkan *National Gas Company* yang tangguh.
3. Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian BUMN RI secara resmi menugaskan PT. Pertamina (Persero) menjadi operator tunggal dalam mengelola Blok Mahakam setelah berakhirnya Kontrak PSC (*Production Sharing Contract*) Blok Mahakam pada tanggal 31 Desember 2017, dan meminta PT. Pertamina (Persero) untuk segera mempersiapkan masa transisi meliputi teknis dan non teknis/sdm.
4. Komisi VI DPR RI meminta kepada PT. Pertamina (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melakukan efisiensi agar mampu menekan biaya produksi dan mampu bersaing dalam rangka menghadapi MEA 2015.
5. Komisi VI DPR RI memberikan dukungan kepada PT. Pertamina (Persero) di dalam mewujudkan 5 (lima) pilar visi PT. Pertamina (Persero) untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Catatan Bahan Rapat Kerja dengan Menteri BUMN :

1. *Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk tidak pembentukan (moratorium) anak perusahaan baru yang tidak mendukung core bisnis induk perusahaannya.*
2. *Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah cq Menteri BUMN dalam menentukan penetapan harga BBM dengan sungguh-sungguh memperhatikan masukan dari PT. Pertamina (Persero) agar tidak mengalami kerugian akibat penetapan harga BBM tersebut.*
3. *Komisi VI DPR RI meminta cq Menteri BUMN RI untuk memberi masukan revisi terhadap Permen ESDM No. 19 tahun 2009; Permen ESDM No. 03/2010; dan PTK BP Migas No. 29/2009.*

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.15 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

IR. H. ACHMAD HAFIZ TOHIR
A-465

